



Judul : Cegah manipulasi anak, DPR minta aparat perkuat patroli siber
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Manipulasi Anak DPR Minta Aparat Perkuat Patroli Siber

ANGGOTA Komisi III DPR Abdullah meminta Polri menggenjatkan patroli siber untuk menekan maraknya kasus *child grooming* atau praktik manipulasi anak, terutama di media sosial. Langkah proaktif aparat menjadi kunci melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual berbasis digital.

"Harapannya Polri dapat menyelamatkan banyak anak Indonesia yang saat ini rentan dimanipulasi dan dieksploitasi secara seksual," ujar Abdullah di Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Keprihatinan tersebut salah satunya dipicu oleh pengakuan seniman Aurelie Moeremans dalam buku memoarnya. Abdullah menilai pengalangan tersebut bukan sekadar kasus personal, melainkan cerminan fenomena gunung es kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital.

Data UNICEF tahun 2022 menunjukkan, 56 persen anak korban eksploitasi seksual daring tidak pernah melapor kepada orang dewasa maupun aparat. Faktor ketidaktahuan, rasa malu, serta takut menimbulkan masalah bagi keluarga menjadi penyebab utama.

Abdullah menilai, Unit Siber Polri memegang peran strategis untuk memantau media sosial, forum, hingga gim daring guna mengidentifikasi pelaku dan pola manipulasi yang menyasar anak-anak. Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik serta mekanisme pelaporan yang ramah anak.

"Pencegahan harus dibarengi pemulihan korban, dengan kolaborasi antara Polri, sekolah, keluarga, platform digital, dan kementerian terkait," tegasnya.

Abdullah menambahkan, pelaku *child grooming* harus dijerat dengan sanksi tegas berdasarkan UU Perlindungan

Anak, UU TPKS, UUI TE, dan KUHP. Hukuman berat dinilai penting untuk memberi efek jera dan memutus mata rantai kejahatan seksual digital.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti belum adanya respons serius dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas pengakuan Aurelie Moeremans. Padahal, kasus tersebut telah menjadi perhatian publik, termasuk komunitas internasional.

"Saya belum mendengar sikap yang tegas dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Padahal ini menyangkut perlindungan anak dan sudah menjadi perhatian luas," kata Rieke.

Menurutnya, relasi manipulatif yang dialami korban sejak usia anak dapat berkembang menjadi eksploitasi seksual dengan dampak trauma jangka panjang. Ia juga menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap pihak-pihak yang membela korban.

Rieke mendorong Komnas HAM dan Komnas Perempuan aktif mengawal kasus tersebut serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya *child grooming*. DPR juga perlu dilibatkan dalam kampanye sosial pencegahan.

"Kita harus membuktikan bahwa KUHP baru benar-benar memiliki taji untuk melindungi anak-anak dari predator digital," tegasnya.

Sebagai informasi, buku *Broken Strings* karya Aurelie Moeremans memuat pengakuan tentang relasi manipulatif yang dialaminya sejak usia 15 tahun. Pengalaman tersebut baru ia pahami sebagai bentuk kekerasan setelah dewasa, dan kini menjadi sorotan publik sebagai contoh nyata bahaya *child grooming* di ruang digital. ■ PVB